

## **Surat Terbuka kepada ASEAN dan Mitra Dialog ASEAN pada peringatan Lima Poin Konsensus**

Kepada: Para Pemimpin ASEAN

Yang Mulia Hun Sen, Perdana Menteri Kamboja, Ketua ASEAN

Yang Mulia Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Perdana Menteri Brunei

Yang Mulia Rodrigo Roa Duterte, Presiden Filipina

Yang Mulia Joko Widodo, Presiden Indonesia

Yang Mulia Thongloun Sisoulith, Perdana Menteri Laos

Yang Mulia TDato' Sri Ismail Sabri bin Yaakob, Perdana Menteri Malaysia

Yang Mulia Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Singapura

Yang Mulia Prayut Chan-o-cha, Perdana Menteri Thailand

Yang Mulia Nguyen Xuan Phuc, Perdana Menteri Vietnam

24 April 2022

Perihal: Satu tahun sejak Kosensus ASEAN atas Myanmar-Waktunya bagi konsekuensi

Yang Mulia sekalian,

Sudah setahun sejak Konsensus Lima Poin tentang Myanmar dicapai pada Pertemuan Pemimpin ASEAN antara semua pemimpin ASEAN dan Jenderal Senior Min Aung Hlaing untuk mengatasi krisis politik dan kemanusiaan yang memburuk yang dipicu oleh kudeta ilegalnya.

Pada tahun itu Panglima Tertinggi Min Aung Hlaing benar-benar gagal menerapkan Konsensus Lima Poin. Mengingat kegagalan ini, sekarang adalah saatnya bagi ASEAN memberi sanksi kepadanya atas penderitaan terus-menerus yang disebabkan pada rakyat Myanmar dan pengabaianya yang terang-terangan pada para mitra regionalnya.

Selama periode ini, militer Myanmar telah melancarkan perang habis-habisan terhadap rakyatnya yang menurut Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia terdiri dari “kesewenang-wenangan dan pelanggaran hak asasi manusia secara sistematis dan meluas” yang dapat dianggap sebagai “kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.” Berbagai kejahatan ini termasuk penangkapan sewenang-wenang ribuan aktivis anti-junta dan anggota keluarga mereka; penyiksaan tahanan secara rutin, seringkali dengan konsekuensi mematikan; penembakan pengunjuk rasa tidak bersenjata, serangan udara atas warga sipil di wilayah-wilayah etnis Myanmar, pembakaran seluruh penduduk desa, dan pembunuhan di luar proses hukum.

Dalam menghadapi kekejian ini, ASEAN kini harus menerima kenyataan, yang berulang kali diperlihatkan dalam beberapa bulan terakhir, bahwa Panglima Tertinggi Min Aung Hlaing, tidak memiliki niat sama sekali untuk mematuhi Konsensus kecuali jika dia merasakan tekanan kuat.

Dalam tanggapan bersama awal APHR, kami menawarkan saran dan dukungan untuk memastikan bahwa pelaksanaan Konsensus Lima Poin memberi kontribusi positif guna memperbaiki situasi di lapangan. Dengan semangat yang sama, kami sekarang mendesak Anda untuk mengambil langkah-langkah berikut untuk menghentikan kekejaman militer Myanmar, meminta pertanggungjawaban para pelakunya, dan memulai proses nyata ke arah perdamaian dan demokratisasi.

Pertama, **ASEAN harus benar-benar mempertimbangkan kembali peran dan mekanisme penunjukan Utusan Khusus untuk Myanmar**, mengingat catatan buruk dari para pemegang jabatan ini, yang diakui sulit, sebelumnya.

Sat ini, Utusan Khusus tidak mewakili ASEAN, tetapi, mewakili Ketua perhimpunan, dan dengan demikian berubah setiap tahun, membuatnya sangat sulit mempertahankan kebijakan yang koheren dari waktu ke waktu. Selain itu, kedua utusan khusus yang telah diangkat sejauh ini adalah pejabat tinggi di kementerian

luar negeri masing-masing, sehingga misi mereka sebagai utusan khusus belum tentu menjadi satu-satunya, atau bahkan prioritas utama.

Untuk membuat posisi lebih efektif, Utusan Khusus haruslah seseorang yang khusus ditugasi untuk misi ini, ditunjuk untuk jangka panjang, dan melapor kepada ASEAN secara keseluruhan, bukan hanya Ketua tahunan. Anggota ASEAN harus menetapkan kerangka acuan yang jelas dan komprehensif yang memperjelas tugas, mandat, dan wewenang yang diemban oleh peran Utusan Khusus; serta mengalokasikan sumber daya yang perlu bagi pelaksanaan misi.

Kedua, ketika Konsensus Lima Poin disetujui tahun lalu, APHR menunjukkan bahwa kurangnya kerangka waktu dan mekanisme penegakan membuatnya hampir tak bergigi. Mengingat kejahatan internasional yang dilakukan tanpa izin oleh Dewan Administrasi Negara (*State Administration Council, SAC*) selama setahun terakhir, sudah saatnya bagi junta untuk menghadapi konsekuensi nyata atas tindakan kriminal mereka. Konsekuensi itu harus mencakup penangguhan keanggotaan Myanmar di ASEAN; larangan perjalanan untuk Min Aung Hlaing dan anggota SAC di kawasan; sanksi yang ditargetkan terhadap para pemimpin kudeta, yakni mereka yang bertanggung jawab melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kepentingan ekonomi mereka.

Ketiga, Konsensus meminta “*dialog konstruktif di antara semua pihak*” untuk “*mencari solusi damai*” atas konflik yang ditimbulkan oleh militer, dan memberi Utusan Khusus ASEAN misi untuk memfasilitasi dialog tersebut. Setahun kemudian, kedua Utusan Khusus tidak hanya tidak membuat terobosan dalam memfasilitasi dialog apa pun, tetapi hanya bertemu dengan perwakilan militer, dan tidak satu pun ada perwakilan dari Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar (NUG), yang mewakili pemerintah yang telah dipilih secara demokratis. dan menerima dukungan dari mayoritas rakyat Myanmar.

Karena itu, kami **mendesak ASEAN untuk segera dan secara terbuka bertemu dengan NUG**. Perwakilan Organisasi Bersenjata Etnis (*Ethnic Armed Organisations*

EAO) juga harus dilibatkan dalam dialog lebih lanjut untuk memastikan bahwa semua suara didengar.

Akhirnya, kudeta telah memicu bencana ekonomi atas 54 juta penduduk Myanmar, dimana setengah dari mereka jatuh ke dalam kemiskinan dan ekonomi negara menyusut hingga 18%, menurut Bank Dunia, yang membuat distribusi bantuan menjadi masalah kedaruratan dan kebutuhan yang paling mendesak.

Rencana ASEAN untuk menyalurkan bantuan melalui ASEAN *Coordinator Center for Humanitarian Assistance on disaster management* (AHA Centre) tidak hanya tidak cukup tetapi secara nyata tidak menjangkau masyarakat yang membutuhkan, sebaliknya ASEAN harus segera **memulai kerjasama yang erat dengan masyarakat lokal Myanmar, organisasi berbasis dan masyarakat sipil, serta badan-badan internasional yang relevan**, untuk secara efektif memberikan bantuan secara langsung pada orang-orang yang membutuhkan. Mengingat skala bantuan yang dibutuhkan dan sejarah militer yang menghalangi pengiriman bantuan kemanusiaan, kolaborasi dengan lembaga-lembaga yang berpengalaman dalam menjalankan operasi kemanusiaan di Myanmar akan membantu memastikan bahwa campur tangan ASEAN mematuhi prinsip “*tidak membahayakan*” (“*do no harm*”).

Kami juga mendesak negara-negara tetangga, khususnya Thailand, untuk mengizinkan mereka yang mengungsi dari penganiayaan dan kekerasan melintasi perbatasannya, mencari suaka dan menerima bantuan kemanusiaan.

Akhirnya, kami mendesak para Mitra Dialog ASEAN dan masyarakat internasional untuk mendukung ASEAN dalam memastikan perhimpunan ini dapat mengambil peran kepemimpinan regional yang diperlukan untuk menanggapi situasi gawat yang terjadi di Myanmar, termasuk dengan mendukung pelaksanaan beberapa rekomendasi di atas.

Pertanyaan bagi para pemimpin ASEAN sekarang adalah: apakah Anda akan membiarkan militer terus melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap

kemanusiaan, dan mengancam keamanan manusia dan pembangunan ekonomi kawasan untuk satu tahun lagi?

Kredibilitas ASEAN tergantung pada kemampuannya untuk bertindak sesuai dengan realitas situasi di Myanmar. **Perhimpunan ini tidak dapat mengharapkan militer mematuhi ketentuan Konsensus Lima Poin, atau norma internasional atau kemanusiaan dalam hal ini.** Sangat penting bahwa negara-negara anggota meningkatkan langkah untuk memberi tekanan nyata pada pihak militer guna menghentikan kebrutalan atas penduduknya sendiri dan perubahan negara itu ke arah negara gagal, serta melakukan segala hal menuju terpenuhinya aspirasi rakyat Myanmar demi perdamaian. dan demokrasi.

Hormat kami,  
Anggota Parlemen ASEAN bagi Hak Asasi Manusia

Tembusan: Para Mitra Dialog ASEAN

Yang Mulia Will Nankervis Duta Besar Australia untuk ASEAN

Yang Mulia Diedrah Kelly Duta Besar Kanada untuk ASEAN

Yang Mulia Deng Xijun Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN

Yang Mulia Igor Driesmans Duta Besar Uni Eropa untuk ASEAN

Yang Mulia Shri Jayant N. Khobragade Duta Besar India untuk ASEAN

Yang Mulia Chiba Akira Duta Besar Jepang untuk ASEAN

Yang Mulia Lim Sungnam Duta Besar Korea untuk ASEAN

Yang Mulia Stuart Calman Duta Besar Selandia Baru untuk ASEAN

Yang Mulia Alexander Ivanov Duta Besar Rusia untuk ASEAN

Yang Mulia Jon Lambe Duta Besar Inggris untuk ASEAN

Yang Mulia Melissa A. Brown Kuasa Usaha ad interim Misi AS ke ASEAN